

BAB 14

Akuntansi Sosial Ekonomi

A. Pengantar

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Ia bisa memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk dikonsumsi, ia membayar pajak, memberi sumbangan, dan lain-lain. Karenanya perusahaan mendapatkan legitimasi bergerak leluasa melaksanakan kegiatannya. Namun, lama kelamaan karena memang perusahaan ini dikenal juga sebagai “binatang ekonomi” yang mencari keuntungan sebesar-besarnya, akhirnya semakin disadari bahwa dampak yang dilakukannya terhadap masyarakat cukup besar dan semakin lama semakin besar yang sukar dikendalikan seperti polusi, keracunan, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, kesewenang-wenangan, produksi makanan haram, bahkan mengatur kebijakan publik untuk menguntungkan perusahaan, merusak moral birokrat, pejabat, sogok-menyogok, dan sebagainya. Bahkan gempa bumi, banjir, tsunami dinilai disebabkan oleh kegiatan manusia khususnya korporasi yang mengeksploitasi bumi secara besar-besaran yang hanya untuk mengejar target ROI, ROA dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dampak luar ini disebut *externalities (socialcost)*

Karena besarnya dampak *externalities* terhadap kehidupan masyarakat, masyarakat pun menginginkan agar dampak ini dikontrol sehingga dampak negatif, *externaldiseconomy* atau *socialcost* yang ditimbulkannya tidak semakin besar. Dari sini berkembanglah ilmu akuntansi yang selama ini dikenal hanya memberi informasi tentang kegiatan perusahaan dengan pihak kedua. Dengan adanya tuntunan ini, akuntansi bukan hanya merangkum informasi tentang hubungan perusahaan dengan pihak kedua (partner bisnis), tetapi juga dengan lingkungannya pihak ketiga. Hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat non-reciprocal artinya transaksi itu tidak menimbulkan prestasi timbal balik dari pihak yang berhubungan. Ilmu akuntansi yang mencatat, mengukur, melaporkan *externalities* ini disebut dengan *socioeconomicaccounting (SEA)*. Istilah lain bisa juga dipakai misalnya *environmentalaccounting*, *socialresponsibilityaccounting*, dan sebagainya.

Dalam akuntansi konvensional yang menjadi faktor perhatiannya adalah pencatatan dan pengukuran terhadap kegiatan atau dampak yang timbul akibat hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau lembaga lainnya (*reciprocaltransaction*) . sedangkan

socioeconomic accounting menyoroti aspek sosial atau dampak (externalities) dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Bidang ini terasa penting saat ini khususnya bagi kita di Indonesia karena banyaknya kegiatan pemerintah maupun perusahaan yang justru ada yang menimbulkan penyakit sosial seperti kerusakan ekosistem, polusi, kriminal, monopoli, keterbelakangan desa, meningkatnya utang, diskriminasi, kemiskinan, dan lain-lain. Dan hal ini sangat disadari dan diperhatikan sekarang khususnya oleh gerakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti Greenpeace di Eropa dan Amerika.

Ilmu socioeconomic accounting (SEA) ini merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mencoba mengidentifikasi, mengukur, menilai, melaporkan aspek-aspek social benefit dan social cost yang ditimbulkan oleh lembaga. Pengukuran ini pada akhirnya akan diupayakan sebagai informasi yang dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan peran lembaga, baik perusahaan atau yang lain untuk meningkatkan kualitas dan lingkungan secara keseluruhan.

B. TIMBULNYA SEA

Kemajuan industri setelah perang II dan munculnya negara sebagai aktor dalam peningkatan kualitas hidup menimbulkan berbagai macam isu yang justru dapat juga merusak kualitas hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam menilai penyakit sosial ini adalah ketiadaan media pengukur arithmetic of quality. Hal ini tergambar dari pernyataan A.W. Clausen, bekas direktur World Bank sebagai berikut:

“ saya samakan bahwa salah satu alasan yang paling kuat atas ketidaksihan respon, kita terhadap isu penyakit sosial itu dan penyebab kebingungan kita terhadap penyelesaiannya adalah ketiadaan ukuran kualitas (Belkaoui, SEA, hlm. 3)”

Ukuran itu penting sehingga setiap unit pemerintah maupun perusahaan mengetahui berapa jauh efek kegiatan lembaganya memengaruhi kualitas hidup manusia, apakah berdampak positif atau negatif. Berapa kontribusi perusahaan untuk meningkatkan pendidikan pegawainya ataupun masyarakat? Berapa jauh pengaruh polusi, pengrusakan lingkungan yang ditimbulkannya? Hal-hal inilah mestinya yang diukur oleh SEA sebagai salah satu ukuran kualitas.

C. DEFINISI SEA

SEA masih merupakan fenomena baru dalam ilmu akuntansi, dan sering ditafsirkan sama dengan Social Accounting yang dihubungkan dengan National Income Accounting. Para ahli juga telah banyak memberikan defenisi dan dalam tulisan ini saya akan kutip definisi dari Ahmed Belkaoui, dalam bukunya tentang *SocioEconomicAccounting*. Beliau menyatakan sebagai berikut:

- SEA timbul dari penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, ini menyangkut pengaturan, pengukuran analisis, pengungkapan pengaruh ekonomi dan spsial dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Hal ini termasuk kegiatan yang bersifat mikro dan makro. Pada tingkatan makro bertujuan untuk mengukuar dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial negara mencakup sosial accounting dan reporting peranan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkatan ,ikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya, mencakup: *financial dan managerial social accounting, social auditing*.

Ada juga yang menyebutkan socioeconomicaccounting sebagai socialresponsibilityaccounting .SEA ini tidak sama dengan socialaccounting yang pengertiannya adalahpengukuran mengenai bagaimana efesiensi suatu sistem ekonomi berfungsi dan memberikan data periodik yang menyangkut indikasi posisi suatu negara menyangkut ukuran externalities itu. Sicialacciunting ini sering juga disebut *nationalincomeaccounting atau macrosocioeconomicaccounting*.

Dalam kaitanya dengan sistem ekonomi, SEA sangat diperlukan dalam suatu sistem ekonomi yang bercirikan sintese, dari sistem ekonomi antara socialeconomy dan institutionaleconomy. Socialeconomy mempunyai komitmen yang dalam terhadap kesejahteraan manusia dan keadilan, sedangkan intitutionalis mempunyai komitmen yang besar terhadap pragmatisme dalam menganalisis sosial ekonomi masyarakat. Negara kita adlah negara yang memperjuangkan kesejahtraan rakyatnya, karena itu SEA ini penting diterapkan bahkan diharuskan untuk diterapkan oleh semua perusahaan dan lembaga di negara kita.

D. Pendorong Munculnya SEA

Literatur dalam ilmu sosial, ilmu sosiologi, dan khususnya kegiatan-kegiatan sosial merupakan saksi dan penyebab yang mendorong tibulnya SEA. Seperti perubahan sikap para ahli dan pengambilan keputusan terhadap peranan bisnis dan unit pemerintah dalam kaitannya dengan efek sosial yang ditimbulkannya. Adayakecenderungan beralihnya perhatian pada kesejahteraan individu ke sejahteraan sosial. Kecenderungan yang bergerak dari kegiatan mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat efek sampingnya ke arah mencai laba yang berwawasan lingkungan. Timbulnya kementrian atau departemen (unit) pemerintahan yang mengurus lingkungan hidup, juga sejalan dengan kemunculan SEA. Kecenderungan ini semua dapat kita lihat dari beberapa paradigma berikut ini:

1. Kecenderungan terhadap kesejahteraan sosial

Sejarah menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya hanya dapat lahir dari sikap kerja sama antarunit-unit masyarakat itu sendiri. Negara tidak bisa hidup sendiri tanpa partisipasi rakyatnya, perusahaan juga tidak akan maju tanpa dukungan langgananya maupun lingkungan sosialnya. Kenyataan ini semakin disadari dan semakin dibutuhkan pertanggungjawabanya. Untuk mengetahui antara negara dan rakyatnya, antara perusahaan dan masyarakatnya, SEA ini sangta berperan.

2. Kecenderungan terhadap kesadaran lingkungan

Dalam literatur paradigma ini dikenal dengan the humen exceptionalism paradigm menuju the new environmm=ent. Paradigma yang pertama menganggap bahwa manusia adalah makhluk unik dibumi ini yang memiliki kebudayaan sendiri yang tidak dapat dibatasi oleh kepentingan makhluk lain. Sebaliknya, paradigma yang terakhir menggap bahwa manusia adalah makhluk di antara bermacam-macam makhluk yang mendiami bumi ynag saling memunyai keterkaitan dan sebab akibat, dan dibatasi olehketerbatasan dunia itu sendiri, baik sosial, ekonomi,atau politik. Sekarang manusia semakin menyadari bahwa paradigma yang belakanganlah yang benar dan menjadi pedoman sehingga perhatian kepada lingkungna semakin besar. Namun sayangnya, ada juga kita lihat gejala baru yang justru akan mengganggu kesejahteraan sosial, yaitu perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan

binatang peliharaan dan kesayang, di negara-negaramaju dan mengabaikan kesejahteraan makhluk manusia sendiri. Kesadaran akan kebenaran environment paradigm merupakan salah satu pendorong munculnya SEA.

3. Perspektif Ekosistem

Orientasi yang terlalu diarahkan kepada pembangunan ekonomi, efisiensi, profit maximization menimbulkan krisis ekosistem. Gejala ini menaruh perhatian para ahli sehingga muncul kelompok-kelompok yang menamakan dirinya penyelamat lingkungan seperti greenpeace, lembaga konsumen, dan lain-lain. Salah satu kelompok tingkat dunia yang menaruh perhatian terhadap ekosistem ini adalah club of rome yang terkenal dengan pempadapnya limits to growth, salah satu putra terbaik kita, almarhum Dr. Soedjatmoko, mantan rektor universitas PBB di jepang, termasuk salah satu anggotanya, walaupun pendapat club of rome ini dikeluarkan tahun 1975, namun hal ini masih segar dan relevan buat kita masa kini. Beberapa saranya yang paling penting adalah stabilitas antara kelahiran dan kematian, stabilisasi inestasi dengan penyusunan barang modal, pengurangan konsumsi sumber-sumber alam, pengutamaan pendidikan dan konsumerisme, penurunan poplasi industri, dan lain-lain. Tanpa pembatasan terhadap tingka laku manusia tampaknya yang timbul hanya kehancuran dan kekacauan termasuk gempa bumi dan tsunami. Perspektif terhadap ekosistem ini mendorong SEA. Pertemuan-pertemuan internasional untuk menyelamatkan bumi dari global warning semain intensif termaksud proyek MDG (Millennium Development Goals)

4. Ekonomisasi vs sosialisasi

Ekonomisasi mengarahkan perhatian hanya kepada kepuasan individual sebagai suatu unit yang selalu mempertimbangkan cost dan benefit tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Sebaliknya sosialisasi memfokuskan perhatiannya lterhdap kepentingan sosial dan selalu mempertimbangkan efek sosial yang ditimbulkan oleh kegiatannya. Walaupun sosialisasi ini belum tampak nyata, namun pengaruh pemerintah dan tekanan sosial cenderung menguntungkan kepentingan sosial. Akhirnya, perlu alat ukur sampai seberapa jauh pengaruh perusahaan terhadap masyarakat.

Sikap Mengatasi Penyakit Sosial

Penyakit sosial yang ditimbulkan oleh pengaruh kegiatan negara dan business perlu ditanggulangi secara tepat dan terarah, salah satu upaya kearah itu adalah perlunya standar atau ukuran tentang kualitas pengaruh kegiatan ini. Di samping itu, tentunya sikap baru yang muncul belakangan ini yang cenderung kearah memperhatikan kesejahteraan sosial perlu didukung dan dimantapkan, bahkan perlu diratifikasikan dan diinstitutionalisasi, hubungan perusahaan masyarakat perlu diserasikan dengan jalan keterlibatan perusahaan untuk memperbaiki ketimpangan sosial masyarakat. Hal ini sudah banyak dimulai oleh banyak perusahaan di Indonesia, antar lain keterlibatan perusahaan dalam pembersihan air limbah akibat industrinya, keterlibatannya dalam kegiatan olahraga, dakwah, pendidikan, bantuan terhadap bencana alam, memberikan beasiswa, dan sebagainya. Dan hal ini telah diatur oleh undang-undang lingkungan hidup yang sudah diberlakukan itu dan juga UU Perseroan terbatas.

Memang masih banyak lagi hal yang belum terlibat bahkan masih melahirkan kerusakan lingkungan. Sayangnya ukuran untuk menilai mana yang paling banyak memberikan kontribusi positif atau dampak negatif terhadap sosial atas kegiatan ini belum ada. Di sinilah peranan SEA dan social responsibility perusahaan diharapkan untuk baik melakukan kegiatan sosial yang mempunyai pengaruh social economy maupun melaporkan, mengukur dan menilai kontribusinya terhadap sosial yang bersifat dis-economy. Berapa social cost yang ditimbulkan industrinya, dan beberapa pula keuntungan yang telah ditimbulkannya. Dengan adanya ukuran semacam ini perusahaan dan pemerintah akan dapat mengambil kebijakan, keputusan terhadap dampak externalities ini. Penilaian terhadap variabel ini semua merupakan bidang dari social auditing.

E. Konsep SEA

Konsep pengukuran, penilaian dalam SEA ini masih dalam proses pembahasan para ahli. Dan FSAB sendiri pun belum mengambil sikap yang tegas dalam persoalan ini. Namun SEA, khususnya tentang polusi telah mewajibkan perusahaan untuk menyajikan pengungkapan. Di pihak lain AAA, AICPA telah membentuk komite dan telah mengeluarkan

laporan yang lumayan lengkap tentang SEA. Di USA kantor akuntan Ernst & Ernst telah melakukan penelitian sejak 1971 tentang keterlibatan sosial perusahaan yang diungkapkan dalam pelaporan tahunan perusahaan.

Beberapa hal yang diungkapkan adalah sebagai berikut:

Lingkungan

- Polusi
- Pencegahan kerusakan lingkungan, konversi sumber-sumber alam, dan lain-lain

Energi

- Konservasi energi
- Penghematan, dan lain-lain

Praktik usaha yang fair:

- Merekrut pegawai dari minoritas dan peningkatan kemampuannya
- Penggunaan tenaga wanita sebagai karyawan
- Pembukaan unit usaha diluar negeri, dan lain-lain

Sumber tenaga manusia

- Kesehatan dan keamanan pegawai
- Training, dan lain-lain

Keterlibatan terhadap masyarakat

- Kegiatan masyarakat sekitar
- Bantuan kesehatan
- Pendidikan
- Seni, dan lain-lain

Produksi:

- Keamanan produksi
- Mengurangi polusi
- Keracunan, dan lain-lain

Disamping variabel diatas, penulis lain banyak lagi yang menyinggung antara lain:

Keterlibatan dengan kegiatan pemerintah, kejujuran terhadap konsumen, meningkatkan informasi mengenai perusahaan dan produksi, peningkatan pendidikan masyarakat, menghargai hak asasi, pembangunan prasarana kota/desa, pembangunan tempat rekreasi, peningkatan perhatian terhadap kebudayaan dan seni dan lain-lain.

Hal ini semua dapat kita manfaatkan untuk mengukur keterlibatan perusahaan dalam kegiatan masyarakat dan tentu ditambah lagi sesuai keadaan kita di indonesia, seperti

peingkatan prestasi olahraga, kegiatan keagamaan dan dakwah, pendirian lembaga sosial dan pendidikan dan sebagainya

Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Pernyataan yang selalu muncul dalam debat ilmiah tentang peran bisnis adalah apakah perusahaan sebagai suatu lembaga unik yang tujuannya mencari laba dan kadang disebut sebagai “ binatang ekonomi” wajib memiliki etika dan tanggung jawab sosial sebagaimana manusia yang beragama; bagaimana menurut paham kapitalis; dan bagaimanbagaiman pula paham kita sebagai negara pancasila? Jawaban atas pertanyaan ini merupakan suatu hal yang akan menentukan kemungkinan eksistensi SEA dalam lingkungan sosial masyarakat. Dengan kata lain, dalam masyarakat yang berperan bahwa perusahaan tidak perlu memiliki etika dan tanggung jawab sosial, maka SEA relatif tidak perlu. Sebaliknya, paham yang mengagap perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial berpendapat bahwa SEA mempunyai peranan yang cukup penting. SEA sebagaimana dijelaskan di muka merupakan penerapan akuntansi dalam ilmu sosial yang menyangkut pengaturan, pengukuran, analisis, dan pengungkapan pengaruh ekonomi dan sosial dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Apabila perusahaan tidak mau tahu dengan sosial dan dari akibat tindakannya serta tidak ada kemaunya untuk mengobati penyakit sosial, maka SEA relatif tidak perlu. Walaupun secara konsepsional paham yang demikian masih ada, kecenderungan menunjukkan sekalipun dinegara kapitalis, perusahaan masih dianggap punya etika dan tanggung jawab.

F. Perusahaan Dan Keterlibatan Perusahaan

Ada beberapa model dan kecenderungan tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. Sepanjang penelitian kepuasan, ada tiga pandangan atau model yang menggambarkan tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. Ketiga model itu adalah sebagai berikut:

1. Model klasik

Pendapat ini, yang berkembang pada abad ke-19, bertitik-tolak pada konsep persaingan sempurna, dimana perilaku ekonomi terpisah dan berbeda dengan bentuk dan jenis perilaku yang lain. Tujuan perusahaan hanya untuk mencari untung yang sebesar-besarnya. Kriteria keberhasilan perusahaan diukur oleh daya guna dan pertumbuhan. Menurut pendapat ini, usaha yang dilakukan perusahaan semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan pasar dan mencari untung yang akan dipersembahkan kepada pemilik modal. Seorang fundamentalis di bidang ini, Milton Friedman menyatakan:

Ada satu dan hanya satu tanggung jawab perusahaan, yaitu menggunakan kekayaan yang dimilikinya untuk meningkatkan laba sepanjang sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam suatu sistem persaingan bebas tanpa penipuan dan kecurangan (Milton Friedman, *Capitalism and Freedom* 1962).

Jelasnya perusahaan, menurut pendapat ini, tidak perlu memikirkan efek sosial yang ditimbulkan perusahaan dan tidak perlu memikirkan usaha untuk memperbaiki penyakit sosial. Itu bukan urusan bisnis, tetapi urusan pemerintah.

2. Model manajemen

Pendapat ini muncul sekitar tahun 1930, setelah muncul tantangan baru dari perusahaan yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan keadaan sebelumnya yang diwarnai oleh pemikiran model klasik. Menurut pendapat ini perusahaan dianggap sebagai lembaga permanen yang hidup dan punya tujuan tersendiri. Manajer sebagai orang yang dipercayai oleh pemilik modal, tetapi juga mereka yang terlibat langsung dengan hidup matinya perusahaan seperti karyawan, langganan, supplier, dan pihak lain yang ada kaitannya dengan perusahaan yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya hubungan kontrak perjanjian (Frank X. Suttin et.al.1956)

Dengan demikian, manajer sebagai tim yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan terpaksa memilih kebijakan yang harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan mengingat ketergantungan dengan pihak lain (masyarakat) yang juga punya andil dalam pencapaian tujuan perusahaan yang tidak hanya memikirkan setoran baut pemilik modal.

3. Model Lingkungan Sosial

Model ini menekankan bahwa perusahaan menyakini bahwa kekuasaan ekonomi dan politik yang dimilikinya mempunyai hubungan dengan kepentingan (bersumber) dari lingkungan sosial dan bukan hanya semata dari pasar sesuai dengan teori atau model klasik. Konsekuensinya perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan penyakit sosial yang berada di lingkungan seperti sistem pendidikan yang tidak bermutu, pengangguran, polusi, perumahan kumuh, transportasi yang tidak teratur, keamanan, dan lain-lain. Kalau model klasik punya tujuan untuk menjahterakan pemilik modal dan model manajemen menjahterakan manajemen, dalam model ini perusahaan harus memperluas tujuan yang harus dicapainya yaitu yang menyangkut kesejahteraan sosial secara umum (Ahmad

Belkaoui, 1980). Dengan demikian, dalam memiliki proyek yang akan dibangun, di sampai memperhatikan persentasi laba, juga harus memperhatikan keuntungan dan kerugian yang mungkin akan diderita oleh masyarakat. Berdasarkan pengamatan sepintas, baik karena pengaruh tuntunan masyarakat melalui tangan pemerintah maupun perubahan sikap manusia dalam perusahaan saat ini. Hal ini berlaku, baik di negara kapitalisme, sosialisasi, apalagi dinegara kita.

4. Kearah eksistensi etika dan tanggung jawab sosial perusahaan

Dalam literatur telah banyak dibahas tentang sikap perusahaan terhadap etika dan tanggung jawab sosial. Mulai dari tanpa keterlibatan, keterlibatan terbatas, sampai kepada keterlibatan total terhadap lingkungan sosialnya. Ahmed Belkaoui dengan cara sistematis mengelompokkan batasan ini dalam lima kategori yang seirama dengan ketiga model yang disajikan di atas (Ahmed Belkaoui,SEA,1984). Berikut ini kita sajikan berturut-turut.

Pertama; tanggung jawab perusahaan hanya terbatas pada usaha mencari laba yang maksimal. Jika perusahaan dapat mengumpulkan laba yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan efek sosialnya, berarti perusahaan sudah memenuhi panggilan tugasnya sebagai badan usaha. Menurut kategori ini, apabila perusahaan diwajibkan untuk memperhatikan lingkungan sosial masyarakatnya, maka akan merusak sendi-sendi ekonomi persaingan bebas keadaan ini sama dengan model klasik diatas

*Kedua:*disamping tujuan mencari untung, perusahaan juga harus memperhatikan pihak-pihak tertentu dengan siapa ia mempunyai kepentingan. Hal ini dicontohkan dengan perbaikan kesejahteraan karyawan, manajemen, menjalin hubungan baik dengan kelompok masyarakat tertentu, dan lain-lain.

Ketiga: perusahaan melepaskan diri dari tujuan hanya mencari laba dengan memperluas tanggung jawab manajemen. Mc Guire menggambarkan potret perusahaan sebagai berikut:

Ide tanggung jawab sosial disini dimaksudkan bahwa perusahaan tidak hanya punya tanggung jawab ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggung jawab tertentu terhadap sosial diluar kewajiban utamanya. Perusahaan harus punya perhatian terhadap politik, dalam mensejahterakanmasyarakatnya,dalam memperbaiki pendidikan, dalam mensejahterakan karyawan, dan hal lain yang bersangkutan-paut

dengan itu. Rasanya hal ini berarti bahwa perusahaan harus berperilaku sebagaimana seorang penduduk yang baik. (Joseph W. McGuire, Business and Society, 1963).

Sebagai penduduk yang baik maka perusahaan mestinya juga bertindak seperti penduduk yang memperhatikan etika sosial.

Keempat: dalam kelompok ini, tanggung jawab sosial perusahaan mencakup hal yang bersifat ekonomi dan nonekonomi dalam kategori ini dikenal tiga pusat lingkaran;

Lingkaran dalam, mencakup tanggung jawab dasar melaksanakan fungsinya dengan efisien, seperti fungsi produksi, penyediaan job, dan pertumbuhan ekonomi.

Lingkaran tengah, mencakup tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonominya dengan penuh kesadaran akan perubahan nilai dan prioritas yang berlaku dalam masyarakat, seperti konservasi lingkungan, perbaikan kualitas hidup, hubungan dengan karyawan dan lingkungan perusahaan.

Lingkungan luar, mencakup tanggung jawab yang baru muncul dan masih berkembang, di mana perusahaan harus secara luas terlibat secara aktif untuk memperbaiki lingkungan sosial (Jacobi, Corporate Power and Social Responsibility, 1973)

Kelima; tanggung jawab sosial diperluas melewati batas tanggung jawab dan mencakup keterlibatan total terhadap tugas-tugas sosial. Prakash Sethi merumuskan bentuk ini dalam tiga dimensi;

Social obligation, merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap permintaan pasar sesuai dengan ketentuan hukum.

Social responsibility menggerakkan perusahaan sehingga segala tindakannya sesuai dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat yang berlaku.

Social responsiveness merupakan respons perusahaan untuk menjawab isu yang akan timbul di masa datang (S.P. Prakash Sethi, Academy of Management Review, 1979).

Keenam; kategori keenam ini merupakan variasi semua pengertian yang diliputi oleh literatur tentang bentuk dan batas tanggung jawab sosial perusahaan di atas. Kita

di Indonesia tentu belum punya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial ini yang mestinya perlu dipikirkan. Namun yang jelas, tampaknya terlepas apa motifnya, di Indonesia sudah banyak perusahaan yang punya perhatian dan keterlibatan dengan lingkungan sosialnya. Hal ini tentu perlu dipupuk, dimoderasi, dan bila perlu ditunjang dengan insentif dan penghargaan yang berarti. Ketentuan perpajakan baru yang terutang dalam UU Perpajakan yang tidak mengakui sumbangan sosial sebagai sesuatu yang dapat mengurangi pajak sebenarnya, bertentangan dengan sikap kita sebagai negara yang memperhatikan aspek sosial yang sebenarnya tidak hanya monopoli pemerintah. Anehnya di negara kapitalis umumnya seperti USA, sumbangan kepada kepentingan sosial, agama, seni, dan lain-lain diakui sebagai yang dapat mengurangi (*tax deductible*) pendapatan kena pajak.

Bradshaw mengemukakan ada tiga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yaitu sebagai berikut;

- a. Corporate philanthropy, di sini tanggung jawab perusahaan itu berada sebatas kemauan atau kerelaan belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini bisa merupakan kegiatan amal, sumbangan atau kegiatan lain yang mungkin saja tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- b. Corporate responsibility, disini kegiatan pertanggungjawaban itu sudah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan bisa karena ketentuan UU atau bagian dari kemauan atau kesediaan perusahaan
- c. corporate policy, disini tanggung jawab sosial perusahaan itu sudah merupakan bagian dari kebijakannya.

Di Indonesia menurut beberapa UU perusahaan ikut bertanggung jawab mensejahterakan masyarakat, apalagi menurut UUD 45 Pasal 33.

G. Pro-Kontra Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Persoalan apakah perusahaan perlu mempunyai tanggung jawab sosial atau tidak, masih terus merupakan perdebatan ilmiah. Masing-masing mengemukakan pendapat dan dukungannya dan mengklaim bahwa idenyalah yang benar. Berikut ini adalah alasan para pendukung agar perusahaan-perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial.

1. Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini sangat menguntungkan perusahaan.
2. Keterlibatan sosial mungkin akan memengaruhi perbaikan lingkungan masyarakat, yang mungkin akan menurunkan produksi.
3. Meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati langganan, simpati karyawan, investor, dan lain-lain.
4. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Campur tangan pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan. Sehingga jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial mungkin dapat menghindari pembatasan kegiatan perusahaan.
5. Dapat menunjukkan respons positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sehingga mendapatkan simpati masyarakat.
6. Sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dalam hal publik.
7. Mengurangi tensi kebencian masyarakat kepada perusahaan yang kadang-kadang suatu kegiatan yang dibenci masyarakat tidak mungkin dihindari.
8. Membantu kepentingan nasional, seperti konservasi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja dan lain-lain.

Di pihak lain, alasan para penantang yang tidak menyetujui konsep tanggung jawab sosial perusahaan ini adalah sebagai berikut.

1. Mengalihkan perhatian perusahaan dari tujuan utamanya dalam mencari laba. Ini akan menimbulkan pemborosan.
2. Memungkinkan keterlibatan perusahaan terhadap permainan kekuasaan atau politik secara berlebihan yang sebenarnya bukan lapangannya.
3. Dapat menimbulkan lingkungan bisnis yang monolitik bukan yang bersifat pluralistik.
4. Keterlibatan sosial memerlukan dana dan tenaga yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh dana perusahaan yang terbatas, yang dapat menimbulkan kebangkrutan atau menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan.
5. Keterlibatan pada kegiatan sosial yang demikian kompleks memerlukan tenaga dan para ahli yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan (Ahmed Belkaousi, SEA 1984)

Bentuk keterlibatan sosial

Bentuk kegiatan apa yang harus dilakukan perusahaan sebagai suatu keterlibatan sosial? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara bulat karena bentuk keterlibatan perusahaan tergantung pada lingkungan sosial, bentuk masyarakat, sifat, dan keadaan tertentu yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain. Namun, beberapa lembaga dan para ahli telah coba merumuskan beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan sebagai bukti keterlibatan sosialnya. Mereka antara lain; Kantor Akuntansi Ernst & Ernst (1971), K. Davis dan R.L Blomstrom (1971), dan Komite Ekonomi (1971). Dalam artikel ini penulis berusaha menggabungkan dengan memperhatikan relevansinya dengan keadaan kita di tanah air. Bentuk kegiatan itu sebagai berikut:

Lingkungan hidup

- Pengawasan terhadap efek polusi
- Perbaikan kerusakan alam, konservasi alam
- Keindahan lingkungan
- Pengurangan suara bising
- Penggunaan tanah
- Pengelolaan sampah dan air limbah
- Riset dan pengembangan lingkungan
- Kerja sama dengan pemerintah dan universitas
- Pembangunan lokasi rekreasi
- Dan lain-lain

Energi:

- konservasi energi yang dilakukan perusahaan.
- penghematan energi dalam proses produksi.
- dan lain-lain.

Sumber Daya Manusia dan Pendidikan:

- Keamanan dan kesehatan karyawan.
- Pendidikan karyawan.
- Kebutuhan keluarga dan rekreasi karyawan.
- Menambah dan memperluas hak-hak karyawan.
- Usaha untuk mendorong partisipasi.
- Perbaikan kesejahteraan dan manfaat pensiun.

- Beasiswa kepada keluarga karyawan atau masyarakat.
- Bantuan pada sekolah atau pendirian sekolah.
- Membantu pendidikan tinggi dan riset dan pengembangan.
- Pengangkatan pegawai dari kelompok miskin, minoritas.
- Peningkatan karier karyawan.
- Dan lain-lain.

Praktik bisnis yang jujur:

- Memerhatikan hak-hak karyawan.
- Memberi kesempatan pada peranan wanita.
- Jujur dalam iklan dan berbisnis.
- Pemberian kredit ringan kepada masyarakat.
- Servis yang memuaskan.
- Produk yang sehat bagi kesehatan.
- Jaminan kepuasan langganan.
- Selalu mengontrol kualitas dan keamanan produk.
- Menandatangani fakta integritas.
- Menjauhi terhadap melakukan sogok terhadap pejabat.
- Dan lain-lain.

Membantu masyarakat lingkungan:

- Memanfaatkan tenaga ahli perusahaan dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya.
- Tidak campur tangan dalam struktur masyarakat.
- Membangun klinik kesehatan.
- Membantu sekolah.
- Pembangunan rumah ibadah.
- Perbaikan desa/kota.
- Sumbangan untuk kegiatan sosial masyarakat.
- Perbaikan perumahan desa.
- Bantuan dana, sosial, gempa bumi, banjir, tsunami.
- Perbaikan sarana pengangkutan dan sarana pasar.
- Dan lain-lain.

Kegiatan seni dan kebudayaan:

- Membantu lembaga seni dan budaya.
- Sponsor kegiatan seni dan budaya.
- Penggunaan seni dan budaya dalam iklan.
- Merekrut tenaga yang berbakat seni olahraga.
- Dan lain-lain.

Hubungan dengan pemegang saham:

- Sifat kejujuran, keterbukaan direksi pada semua persero.
- Peningkatan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
- Pengungkapan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial.
- Dan lain-lain.

Hubungan dengan pemerintah:

- Menaati peraturan pemerintah.
- Membatasi kegiatan *lobbying* dan sogok-menyogok.
- Mengontrol kegiatan politik perusahaan.
- Membantu lembaga pemerintah sesuai dengan kemampuan perusahaan, membantu secara umum usaha peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
- Membantu proyek dan kebijaksanaan pemerintah.
- Meningkatkan produktivitas sektor informal.
- Pengembangan dan inovasi manajemen.
- Menghindari praktik KKN.
- Dan lain-lain.

Sebenarnya banyak lagi hal yang yang dapat dikemukakan sesuai dengan keadaan, baik yang dialami masyarakat maupun potensi yang dimiliki perusahaan. Hal yang penting diingat adalah bahwa kegiatan ini menyangkut keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. Seperti sponsor kegiatan olahraga, pendirian klub olahraga, pendirian lembaga keagamaan, membantu kegiatan keagamaan, memperingati perayaan keagamaan dan kebangsaan, pameran yang menyangkut kepentingan masyarakat, proyek penelitian, kerja sama dengan universitas, seminar, simposium, beasiswa tanpa atau dengan ikatan dinas, dan lain-lain.

Pelaksanaan *Socio Economic Accounting* ini akan semakin cepat oleh beberapa tekanan atau faktor antara lain:

1. adanya peraturan pemerintah atau UU yang diberlakukan.
2. ditetapkannya standar akuntansi yang mengharuskan pengungkapan tanggung jawab sosial.
3. adanya tekanan dari *pressure group* misalnya, Greenpeace, Trade Union, PBB, dan lain sebagainya.
4. Kesadaran perusahaan.

H. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia.

Tanggung jawab sosial dan etika perusahaan di Indonesia sebenarnya tak perlu diragukan. Hal ini terbukti dari keterlibatan perusahaan, baik langsung maupun melalui jalur pemerintah atau badan-badan sosial dalam mengatasi penyakit sosial dan memperbaiki/membantu sarana dan kegiatan sosial, seperti; mensponsori kegiatan olahraga, pembersihan polusi dan air limbah, membantu korban bencana alam, mendirikan sarana pendidikan, kesehatan, membantu/melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, MTQ, perkabaran Injil, beasiswa dan pengembangan karier. Bahkan, kita telah memiliki UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh. UU ini kemudian diubah dan dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 1997 dengan topik yang sama.

Namun, kita tidak dapat menutup mata terhadap ulah sebagian perusahaan yang merugikan kepentingan sosial seperti, pengrusakan hutan, lingkungan, iklan palsu, jaminan palsu, kualitas produk yang tidak benar, barang kedaluwarsa, kekurangan informasi tentang produk, penipuan-penipuan lain, kebisingan, keracunan dan produk yang merusak kesehatan. Kadang kita malu melihat situasi kita yang didaulat sebagai sistem yang terbaik ternyata kurang memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial sebagaimana yang dijaga dan dimiliki oleh sistem kapitalis bahkan sosialis sekalipun. Lihat kutipan dari Drucker berikut ini.

Tidak ada suatu lembaga yang hidup sendiri dan mati sendiri. Setiap orang/lembaga adalah unsur yang tidak terpisah dari masyarakat dan hidup demi kepentingan masyarakat. Perusahaan tidak terkecuali. Perusahaan yang bebas tidak dapat disebut

sebagai baik untuk perusahaan, ia hanya dapat dikatakan baik jika baik untuk masyarakat (Peter F. Drucker, *Management: Task, Responsibilities, 1973*),

Dan Belkaoui:

Perusahaan adalah penduduk dan harus menjadi penduduk yang baik (Ahmed Belkaoui, SEA, 1984).

Secara formal, pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan pernyataan yang melindungi kepentingan sosial, baik bagi pendirian atau pembangunan perusahaan maupun proyek baru. Keberadaan BKPM (D) dan Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Sosial, dan lain-lain bertugas menjalankan misi itu, misalnya dengan kewajiban pembuatan AMDAL yang diatur dalam PP No. 29 Tahun 1986. Secara konstitusional, UUD 45, GBHN, dan peraturan pelaksanaannya menggariskan perlunya aspek sosial diperhatikan oleh setiap orang, termasuk perusahaan. Dengan demikian, jelaslah bahwa kita menganut konsep dimana perusahaan memiliki tanggung jawab penuh, kendatipun pembatasannya belum begitu jelas. *SocioEconomicAccounting* berusaha mengidentifikasi, mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan dan menganalisis efek keterlibatan perusahaan ini, baik untung (*benefit*) dan kerugian (*cost*) yang dialami masyarakat. Informasi ini sangat penting bagi perusahaan maupun bagi pihak luar, seperti pemerintah dan sosial dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Pengukuran dalam *SocioEconomicAccounting*

Masalah pengukuran ini merupakan hal yang sangat rumit dalam *Socio Economic Accounting* ini. Dalam akuntansi konvensional jelas bahwa setiap transaksi baru dapat dicatat jika sudah mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dalam SEA kita harus mengukur dampak positif (*socialbenefit*) dan dampak negatif (*social cost*) yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Biasanya dampak positif dan negatif ini belum dapat dihitung karena memang transaksinya bersifat *uncompletecycles*, *non-resiprocal* dan belum mempengaruhi posisi keuangan perusahaan.

Biasanya tidak semua dampak negatif positif itu dapat dihitung dan belum ada pembahasan lengkap dalam literatur tentang pengukuran untuk semua jenis *externalities* ini. Biasanya yang telah dibuat pedoman pengukurannya adalah seperti kerusakan lingkungan, polusi udara, polusi air. Itupun baru dalam tahap formula pengukuran dengan menggunakan

taksiran. Dalam mengukur semua kegiatan semua sumber dan objek kerugian dihitung. Kerugian ini bisa kerugian finansial atau kerugian umum (*amenityloss*). Kerugian keuangan misalnya kerugian produksi akibat kerusakan lingkungan. Kerugian *amenity* misalnya penderitaan jiwa yang dialami masyarakat, individu, dan keluarga.

Salah satu akibat dari polusi udara adalah rusaknya kesehatan manusia yang antara lain menyebabkan kematian premature. Kematian premature ini disebabkan oleh berbagai hal dan memerlukan biaya pengobatan, pencegahan dan sebagainya. Biaya inilah yang dihitung sebagai komponen *socialcost*. Dari sisi lain *Midwest Research Institute* (MRI) (Belkaoui, 1985 hlm. 197) melaksanakan studi tentang kaitan polusi udara dengan bahan, lingkungan, dan makhluk hidup yang terkena polusi. Kerugian ekonomis dari bahan yang menjadi polusi ditaksir dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Q = P \times N \times F \times R$$

Q = Kerugian akibat Polusi.

P = Produksi dalam dolar.

N = Umur ekonomis dari suatu bahan yang dinilai berdasarkan penggunaannya.

F = Faktor rata-rata tertimbang sebagai presentase bahan yang menimbulkan polusi udara.

R = Faktor tenaga kerja yang menggambarkan nilai bahan yang dipakai dan nilai yang masih ada.

Kerugian yang terjadi kepada tanah akibat polusi tadi dihitung dengan rumus :

$$L = Q \times V$$

L = Kerusakan lahan

Q = Nilai bahan yang menyebabkan polusi sebagai mana rumus di atas.

V = Nilai Interaksi tanah pertahun.

Disinilah rumitnya menghitung dampak ekonomisnya itu, karena semua dampak itu harus dinilai dan sampai saat ini para ahli masih terus melakukan studi bagaimana menaksir kerugian itu. Para aktivis lingkungan ternyata telah banyak membantu dalam melakukan penaksiran ini.

Namun demikian sebagai informasi yang akan dilaporkan dalam *SocioEconomicreporting* dibuat berbagai metode pengukuran misalnya sebagai berikut:

1. Menggunakan penilaian dengan menghitung “ *Opportunity Cost Approach*”. Misalnya dalam menghitung social cost dari pembuangan, maka dihitung berapa kerugian manusia dalam hidupnya, berapa berkurang kekayaannya, berapa kerusakan wilayah rekreasi; dan lain sebagainya akibat pembuangan limbah. Total kerugian itulah yang menjadi *social cost* perusahaan (Belkaouni, 1985 p. 195)
2. Menggunakan daftar kuesioner, survei, lelang, dimana mereka yang merasadirugikan ditanyai berapa besar jumlah kerugian yang ditimbulkannya atau berapa biaya yang harus dibayar kepada mereka sebagai kompensasi kerugian yang dideritanya.
3. Menggunakan hubungan antara kerugian massal dengan permintaan untuk barang perorangan dalam menghitung jumlah kerugian masyarakat.
4. Menggunakan rekreasi pasar dalam menentukan harga. Misalnya vonis hakim akibat pengaduan masyarakat akan kerusakan lingkungan dapat juga dianggap sebagai dasar perhitungan.

Sebagai pedoman, berikut ini kita lihat bagaimana mengukur keuntungan suatu kawasan rekreasi. Calawsen dan Knetsch (Belkaouni, 1985, halaman 199) misalnya memberikan metode pengukuran untuk menaksir keuntungan dari suatu kawasan rekreasi sebagai berikut :

1. Metode Harga Maksimum (*Maximum price method*). Disini ditaksir seluruh jumlah yang dibayar oleh pengunjung daerah rekreasi tersebut.
2. Metode Pengeluaran Kotor (*Gross Expenditure Method*). Disini ditaksir keseluruhan jumlah yang dibelanjakan oleh pengunjung selama rekreasi.
3. Harga Pasar Ikan (*Market Value Of Fish Method*). Disini ditaksir harga pasar dari semua ikan yang ditangkap pengunjung selama rekreasi.
4. Metode Harga Pokok (*Cost Method*). Disini disamakan keuntungan yang diperoleh dari suatu kawasan rekreasi dengan harga pokok pembangunannya.
5. Metode Harga Pasar (*Market Value Method*). Disini digunakan penaksiran nilai berdasarkan harga pasar atau harga yang dibebankan di daerah rekreasi lainnya.
6. Metode Interview Langsung (*Direct Interview Method*). Disini ditanya secara langsung para pengunjung, berapa mereka bersedia membayar karena mengunjungi daerah rekreasi itu.

Di pihak lain, Estes (1976) mengusulkan berbagai teknik pengukuran sebagai berikut:

1. Penilaian pengganti (*Surrogate Valuation*).
2. Teknik Survei³)
3. Biaya perbaikan dan pencegahan.
4. Penilaian (*Appraisal*) oleh tim independen.
5. Putusan pengadilan.
6. Analisis.
7. Biaya pengeluaran

I. Pelaporan

Untuk melaporkan aspek sosial ekonomi yang diakibatkan perusahaan ada beberapa teknik pelaporan SEA ini misalnya Diller (1970) mengungkapkan tekniknya sebagai berikut.

1. Pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya.
2. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Dibuat dalam perkiraan tambahan misalnya melalui adanya perkiraan (akun) penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.

Pelaporan dalam SEA berarti memuat informasi yang menyangkut dampak positif atau negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan. Berikut ini sekedar contoh pelaporan SEA sebagai berikut (lihat halaman 416).

Disamping mereka yang mendukung penerapan akuntansi Socio Economic Accounting atau akuntansi pertanggung jawaban sosial ini, ada juga yang mengkritiknya. Adapun kritiknya adalah sebagai berikut.

1. Informasi pertanggung jawaban sosial itu hanya menambah biaya saja dan tidak dibutuhkan oleh pemegang saham atau investor lainnya.
2. Ukuran dampak sosial perusahaan dalam satuan moneter secara teknis tidak dapat dilakukan karena sangat kompleks dan merupakan estimasi saja.

PT Ezly Bazliyah
Socio Economic Operating Report
31 Desember 2005
(dalam ribuan)

I. Kaitan dengan masyarakat:

A. Perbaikan:

1. Pelatihan orang cacat.	Rp 20.000
2. Sumbangan pada lembaga pendidikan.	Rp 8.000
3. Biaya ekstra karena merekrut minoritas.	Rp 10.000
4. Biaya penitipan bayi.	Rp 22.000

Total perbaikan Rp 60.000

B. kerusakan:

penundaan pemasangan alat pengaman	Rp 28.000
perbaikan (bersih) untuk masyarakat (I)	<u>Rp 32.000</u>

II. kaitan dengan lingkungan

A. perbaikan

1. Reklamasi lahan dan pembuata taman	Rp140.000
2. Biaya pemasangan kontrol polusi	Rp 8.000
3. Biaya pematian racun limbah	Rp 18.000

Total perbaikan Rp166.000

B. Kerusakan:

1. Biaya yang akan dikeluarkan untuk reklamasi pertambangan	Rp160.000
2. Taksiran biaya pemasangan penetralan racun air	Rp200.000
Total kerusakan	<u>Rp360.000</u>

C. Defisit(II) (Rp194.000)

III. Kaitan dengan produk:

A. perbaikan:

1. gaji eksekutif sewaktu melayani komisi pengamanan produk	Rp 50.000
2. biaya pengganti cat beracun	Rp 18.000
total perbaikan	<u>Rp 68.000</u>

B.	kerusakan	
	1. pemasangan alat pengaman produksi	Rp 44.000
C.	net perbaikan (III)	<u>Rp 24.000</u>
	total Socio Economic Defisit 1993 (I+II+III)	<u>Rp138.000</u>
	saldo kumulatif net perbaikan 1.01.1993	<u>Rp498.000</u>
	saldo kumulatif net perbaikan 31.12.1993	<u>Rp360.000</u>

3. Faktor-faktor diluar perusahaan bukan merupakan tanggung jawab perusahaan dan ia tidak dapat mengendalikannya.
4. Belum ada kesepakatan umum tentang konsep, tujuan, pengukuran maupun pelaporannya.
5. Informasi tentang APS ini akan dapat mengalihkan perhatian pada indikator bisnis intinya sehingga dapat menyulitkan para pengambil keputusan.
6. Hal ini mengaburkan posisi perusahaan dan pemerintah dalam melaksanakan tugas masing-masing yang saling berbeda. Jadi jangan dibebaskan tugas pemerintahan kepada perusahaan.

ROI dan ROS (Return on Social Objectives)

Apakah perusahaan atau lembaga ekonomi harus juga bertanggung jawab pada aspek sosial atau urusan sosial? Milton Friedman dan pemikir kapitalis tulen khususnya dari Amerika menyatakan NO. Itu urusan pemerintah dan rakyat. "pemilik modal cukup bayar pajak, titik!" katanya. Namun, bagi kapitalis Eropa khususnya negara-negara Skandinavia jawabannya lebih lunak makanya ini dinilai berpaham ekonomi kapitalis humanis. Perbedaan sifat humanis antara kapitalis Amerika dengan negara Skandinavia misalnya dapat dilihat dari cuti hamil. Di Amerika cuti hamil hanya diberikan satu hari, sedangkan di beberapa negara Skandinavia diberikan 8 bulan atau 240 hari, suatu perbedaan yang mencolok. Bahkan saat ini sedang diperjuangkan cuti bagi suami yang tidak terpisahkan peranannya dalam proses kelahiran anak yang juga ingin ikut berbagi kegembiraan atas datangnya sang bayi si permata hati.

Apakah masalah sosial ini hanya menjadi urusan negara?. Kenyataannya tidak. Beberapa permasalahan sosial semakin hari semakin berat dan bukan hanya menjadi isu nasional, tetapi telah menjadi masalah global baik di negara kapitalis maupun di negara dunia ketiga. *Social Ills* ini dianggap sebagai bagian dari dampak negatif dari kapitalisme terutama

yang berkaitan dengan isu ketimpangan sosial dan kerusuhan sosial yang belakangan ini marak di beberapa negara miskin termasuk di Indonesia, Brazil, Kolumbia, dan lain-lain. PBB dan lembaga internasional lainnya sudah lama menjadi agenda kendatipun banyak ditekan oleh Amerika dan negara G8 lainnya yang tentu berkat bisikan dan dukungan konglomerat multinasional sekarang.

Saat ini ada kesadaran baru yang sangat substantif. Kesadaran akan bahaya ini sudah mulai merambas ke bidang pendidikan khususnya lembaga pendidikan yang bertaraf internasional seperti Berkeley Haas School of Business University of California, Columbia Business School, London Business School, bahkan yayasan yang dibentuk oleh konglomerat juga ikut berperan seperti Goldman Sachs Foundation.

Menurut Lura D'Andrea Tyson, seorang akademisi dari London Business School yang juga seorang kolumnis Business Week yang juga seorang penulis yang sangat kritis ia menulis dalam majalah Business Week edisi May 3, 2004 dan menyatakan adanya pergeseran perhatian sekolah-sekolah bertaraf internasional ini untuk memerhatikan aspek sosial dari perusahaan besar. Menurut beliau saat ini sekolah bisnis mencoba melakukan pengukuran aspek sosial atau tanggung jawab sosial dari bisnis jadi bukan hanya aspek keuangan seperti ukuran *Return on Investment*(ROI), *Return on Asset*(ROA), *Return on Equity*(ROE), *Earning Per Share*(EPS), dan rasio keuangan lainnya.

Sebenarnya masalah ini sudah menjadi isu lama. Dalam akuntansi sendiri sejak dekade 80-an sudah dikenal Socio Economic Accounting yang mencoba mengukur dampak sosial baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif dari aktivitas perusahaan terhadap publik atau sosial. Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab entitas perusahaan terhadap publik atau sosial. Dengan ukuran dan informasi ini, diharapkan masyarakat dan pengambil keputusan dapat melihat sejauh mana komitmen perusahaan dianggap citizen yang baik artinya tidak boleh merusak lingkungan dan masyarakat, dia harus bisa memberikan manfaat kepada sesama kelompok sosial.

Diluar informasi akuntansi yang disebutkan di muka, dalam dunia bisnis beberapa upaya untuk mengukur tanggung jawab sosial ini telah dilakukan. Misalnya, *Global Social Venture Competition* atau kompetisi perusahaan yang berskala global mengenai komitmen sosial telah disponsori oleh gabungan dari sekolah bisnis berprestise, yaitu Berkeley Haas School of Business University of California, Columbia Business School, London Business School. Dalam kompetisi ini dicoba dirumuskan ukuran atau kompetisi dari kinerja atau aspek keuangan saja. Namun, dalam konteks ini dinilai dua kriteria; mengukur Social

objectives dan menilai tingkat sustainability atau program pencarian tujuan sosial yang berkelanjutan. Istilah lain, *social entrepreneur* muncul untuk menunjukkan komitmen seorang entrepreneur pengembangan sosial melalui proyek-proyek sosial yang berkelanjutan. Dia tidak hanya memikirkan masalah mikro perusahaan dan aspek keuangan melulu, tetapi ia juga harus memikirkan aspek sosial yang tidak bisa lepas dari lingkungan bisnis secara menyeluruh.

Standford social innovation review telah mengembangkan ukuran-ukuran mengenai inovasi sosial. *Global Entrepreneur Monitor* London Business School dan Babson College mencoba mengukur *socio entrepreneurship* di seluruh dunia, dan sebagainya. Ide ini sebenarnya dipicu oleh berbagai peristiwa antara lain dari buku yang berjudul; *How to change the world*; *social Entrepreneurs and the power of new ideas* yang ditulis oleh David Bornstein. Ide ini terus berkembang dikalangan pemikir *mainstream* kapitalis Amerika. Memang ide ini sudah lama menjadi topik bahasan para pemikir sosialis, religious, dan critical thinker lainnya, tetapi tidak bisa memasuki ring satu mainstream kapitalis Amerika.

Namun, karena semakin besarnya tekanan internasional maka kemudian menjadi bagian yang mau tidak mau harus menjadi agenda kapitalis atau perusahaan besar, paling tidak di mata sekolah-sekolah berprestise yang menelorkan eksekutif kelas kakap itu. Jika hal ini tidak menjadi perjuangannya, kepercayaan publik terhadap perusahaan besar akan semakin menurun dan akhirnya dapat meruntuhkan eksistensi dari perusahaan itu sendiri yang saat ini sangat rentan.

Salah satu yang bias mewajibkan ini adalah penyusun standar akuntansi (*standar setting body*) di IAI disebut Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Bisa juga regulator industri apakah Bank Indonesia untuk industri perbankan, Bapepam atau Bursa Efek Indonesia untuk perusahaan yang sudah mendaftarkan diri di pasar modal atau lembaga pemerintahan lainnya seperti Kementerian Keuangan untuk industri asuransi atau lembaga keuangan nonbank lainnya. Dalam profesi akuntansi, ada dua standar yang memberikan aturan. Pengungkapan yang bersifat wajib dan pengungkapan yang bersifat sukarela. Dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa sudah banyak perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya yang telah mengungkapkan aspek-aspek sosial yang dilakukan perusahaan walaupun belum diwajibkan oleh PSAK pernyataan standar akuntansi keuangan, yang dikeluarkan IAI. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan itu ada. Untuk perusahaan yang saat ini maraca, yaitu perusahaan yang dikelola dan beroperasi secara syariah, ternyata tanggung

jawab sosial ini lebih kental karena visi misinya yang tidak bisa lepas dari tanggung jawab sosial dan tanggung jawabnya kepada Allah Swt.

Di tanah air semoga tren mengenai kesadaran akan tanggung jawab sosial ini dapat menjadi perhatian regulator, ekonom, profesional, dan para eksekutif sehingga perusahaan tidak menimbulkan hal-hal negatif bagi masyarakat. Di Indonesia perusahaan konglomerat sudah terlanjur rusak nama baiknya karena telah dituding banyak menimbulkan kesusahan masyarakat baik karena korupsi, pengrusakan hutan dan lingkungan, pembuangan limbah sembarangan yang menimbulkan penyakit, keresahan sosial dan bahkan menimbulkan pengangguran dan ketimpangan sosial. Para akademisi dapat berbuat banyak baik dalam memberikan pelajaran kepada mahasiswa maupun dalam melakukan penelitian serta publikasi hasil-hasilnya.

Soal-soal

1. a. Apa yang dimaksud dengan *Socio Economic Accounting*(SEA)?
b. jelaskan sejarah munculnya dan perkembangannya!
2. Bagaimana perkembangan akuntansi ini dalam era modern sekarang ini? bagaimana pula di Indonesia?
3. Apa yang mendorong munculnya akuntansi SEA ini?
4. a. Bagaimana perkembangan SEA di Indonesia?
b. UU nomor berapa yang mengatur lingkungan hidup?
5. Sebutkan beberapa indikator yang mendukung munculnya SEA di Indonesia!
6. Sebutkan UU yang bisa dipakai sebagai landasan SEA!
7. Jelaskan pengertian *arithmetic quality* dan kaitannya dengan SEA!
8. Sebutkan hal-hal apa yang akan diukur dalam SEA!
9. Bagaimana seharusnya sikap (etika) sebuah perusahaan dalam suatu negara?
10. Jelaskan pengertian model-model ini dalam SEA;
 - a. Model klasik
 - b. Model manajemen
 - c. Model lingkungan sosial
11. Bagaimana melaporkan pengaruh *externalities* itu?
12. Sebutkan contoh *social cost* dan *social Benefit*!
13. Sebutkan beberapa contoh pos atau perkiraan yang berkaitan dengan SEA!

14. Sebutkan beberapa tingkat tanggung jawab sosial perusahaan!
15. Jelaskan beberapa metode pengukuran SEA!
 - a. Sebutkan beberapa pendapat tentang tanggung jawab sosial perusahaan!
 - b. Apa alasan yang membela dan yang tidak setuju?
16. Sebutkan beberapa alasan yang menganggap SEA belum perlu!
17. Sebutkan beberapa cara pengungkapan tanggung jawab sosial ini!
18. Buatlah contoh pelaporan Akuntansi Sosial Ekonomi!
19. Sebutkan sejauh mana IAI atau PSAK merespons Akuntansi pertanggung jawaban sosial ini!
20. Sebutkan beberapa perusahaan yang menerapkan Akuntansi Pertanggung jawaban sosial ini!
21. Jelaskan UU tentang lingkungan hidup yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan!
22. Jelaskan isi UU PT yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan!